

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA EKONOMI RAKYAT DI KECAMATAN ANDOOLU KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**Abdul Nashar**

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sospol Universitas Sulawesi Tenggara

Email : [abdulnashar99@yahoo.com](mailto:abdulnashar99@yahoo.com)

### *Abstract*

The general objective of the research is to know community participation in the empowerment of people's economic institutions, where the specific objectives of the study are (1) Knowing community participation and (2) factors that encourage and hinder community participation in empowering people's economic institutions in Andoolu Subdistrict, Konawe Selatan Regency. The research method is qualitative descriptive, and the results of the study indicate that; (1) The level of activity of the people's economic institutions is said to be good because it is supported by the level of education and the level of income of the management is relatively high, (2) The level of service of the institution to members is also good; (3) Factors driving and inhibiting community participation in the empowerment of people's economic institutions, namely: factors supporting leadership from the management of the institution, inhibiting factors for budget allocation for cooperative development are relatively low and the pattern of cooperative development is still incidental. Strategies that should be used to develop participation are; Increasing public knowledge through fostering business skills and managing businesses, Increasing community income through the necessary business capital. And Increased supervision of institutions so that their programs and services to the community can be accounted

**Keywords:** *Activities; Economic; Institutions*

## **A. Latar Belakang**

Komitmen mengenai sistem demokrasi ekonomi Indonesia adalah terletak pada keberpihakan yang dapat meningkatkan peran rakyat dalam perekonomian, dan kesejahteraan rakyat dalam kehidupan nyata. Karena itu, demokrasi ekonomi Indonesia harus berlandaskan pada kekeluargaan dan kebersamaan, dan mengandung ajaran-ajaran pembangunan individu masyarakat secara serasi, selaras, dan seimbang. Dengan demikian tampaknya sudah disadari dan di yakini bahwa partisipasi masyarakat terutama dalam pembangunan demokrasi ekonomi merupakan salah satu persyaratan utama untuk keberhasilan pembangunan.

Sehubungan dengan itu pada era ke depan sasaran pemba-ngunan di bidang ekonomi adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yakni dengan koperasi.

Sebagai wadah ekonomi rakyat, koperasi mempunyai ciri demokratis, kebersamaan, partisipatif dan berwatak sosial sehingga ia merupakan organisasi ekonomi yang mencerminkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan ekonomi akan mudah diwujudkan apabila koperasi dapat berperan lebih kuat dalam perekonomian.

Sebagai bagian dari upaya pengembangan Lembaga Ekonomi rakyat, koperasi adalah yang paling menonjol disamping itu nampak pula tumbuh ditengah-tengah masyarakat adanya perkumpulan-perkumpulan yang salah satu kegiatannya adalah meningkatkan perekonomian individu-individu dalam kelompok mereka. Kegiatan ini dapat terbentuk melalui wadah kelompok-kelompok arisan ibu-ibu, dan juga dapat melalui embrio Majelis Ta'lim.

Searah dengan hal tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ; (a) Untuk mengetahui Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lembaga-lembaga ekonomi rakyat di Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan dan (b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lembaga-lembaga ekonomi rakyat di Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan .

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Konsep Partisipasi Masyarakat**

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "*partisipasi*" berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencanarencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya

Slamet (1194 :1), menggunakan istilah umum tentang partisipasi diartikan dalam kaitannya dengan pembangunan sebagai pembangunan masyarakat yang mandiri. Misalnya perwakilan, mobilitas sosial, pembangunan sosial yang merata terhadap hasil-hasil pembangunan, penetapan kelembagaan khusus, demokrasi politik dan sosial, reformasi sosial, atau bahkan yang disebut revolusi rakyat. Selanjutnya dijelaskan bahwa ada tiga cara memandang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pertama, adalah pembagian massal dari hasil-hasil pembangunan. Kedua, sumbangan massal terhadap payah pembangunan. Ketiga adalah pembuatan keputusan didalam pembangunan.

Menurut Juliantara (2002:87) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah :

Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. (Juliantara, 2002: 89-90).

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan.

## 2.2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasmita, 1998 : 144).

Upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga sasaran : *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Dengan kata lain membangun daya itu dengan mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awarenes) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering), kemudian diperlukan langkah-langkah positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. *Ketiga*, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi tambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat (Kartasmita, 1998 : 159).

Selanjutnya Menurut Kartasasmita, kegiatan pemberdayaan masyarakat hendaknya dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : pertama, mengenali masalah mendasar yang menyebabkan terjadinya kesenjangan. Kedua, mengidentifikasi alternatif untuk memecahkan masalah, dan ketiga, menetapkan beberapa alternatif yang dipilih dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas, memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan, serta posisi yang dikembangkan. Kemudian dalam pelaksanaan ada beberapa persyaratan pokok yang perlu diperhatikan. : Pertama, kegiatan yang dilakukan harus terarah atau menguntungkan masyarakat yang lemah, terbelakang dan tertinggal. Kedua, pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Ketiga, mengembangkan kegiatan bersama (koperatif) dalam kelompok yang dibentuk atas dasar wilayah tempat tinggal, jenis usaha atau kesamaan latar belakang. Keempat, menggerakkan partisipasi dari masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan nasional. Disini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju.

Pemberdayaan dalam suatu usaha dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta dalam rangka memberikan kekuatan perusahaan untuk dapat berkembang melalui bantuan pendidikan dan keterampilan serta bantuan modal (Harjanto, 1995 : 11)

Selanjutnya Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk memberikan kekuatan perusahaan, suatu organisasi agar mampu mengembangkan dirinya melalui bantuan, baik yang bersifat materil maupun yang bersifat teknis melalui pendidikan dan pelatihan secara teratur (Soekirno, 1995 : 23)

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas tentang konsep pemberdayaan maka dapat disimpulkan: pemberdayaan adalah peningkatan kekuatan perusahaan/lembaga/kelompok melalui berbagai bantuan baik yang bersifat materil maupun non materi dalam bentuk teknis operasional dari pemerintah atau mitra usaha sehingga memungkinkan usaha untuk dapat dikembangkan.

### **2.3. Lembaga Ekonomi Rakyat**

Pembangunan ekonomi yang mandiri dan handal untuk kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata hanya dapat diwujudkan melalui demokrasi ekonomi, terutama dengan upaya memberdayakan ekonomi rakyat. Hal ini sesuai dengan harapan yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa dengan melaksanakan demokrasi ekonomi, maka akan terjamin partisipasi semua anggota masyarakat, baik yang memiliki modal atau faktor-faktor produksi lain, maupun yang hanya memiliki tenaga kerja saja Partisipasi penuh seluruh anggota masyarakat dalam produksi dan distribusi berarti juga menjamin pemerataan sebab prasyarat perwujudan keadaan sosial.

*Pertama*, Konsep Ekonomi Rakyat. Menurut Mubiyarto (1997:12), mengemukakan bahwa ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya setempat, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya.

Keterkaitan itu lebih rinci dijelaskan bahwa ekonomi rakyat, dilakukan oleh rakyat tanpa modal besar, dan dengan cara-cara swadaya. Usaha yang beristirahat mandiri adalah ciri khas usaha sektor ekonomi rakyat. Dalam usaha, ekonomi rakyat tidak ada buruh tidak ada majikan, tidak ada motivasi mengejar untung dan hanya sekedar bertahan hidup.

Kartasasmita (1996:131), mengemukakan bahwa ekonomi rakyat dapat dikenal, dari ciri-ciri pokoknya yang bersifat tradisional, skala usaha kecil dan kegiatan atau usaha ekonomi bersifat sekedar untuk berlahan hidup. Selanjutnya ekonomi rakyat diartikan sebagai ekonomi usaha kecil, masih lemah dan kurang tangguh untuk menghadapi dan memperoleh manfaat dari ekonomi terbuka. Selama ini lapisan ekonomi rakyat, meskipun mencatat kemajuan-kemajuan cukup jauh tertinggal dan dapat makin tersisih jika dihadapkan pada persaingan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dari luar.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif, dengan Populasi penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat di Kecamatan Andolo Kabupaten Konawe Selatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: (a) Study kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan ini, (2) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan menggunakan metode; Observasi (*pengamatan*) dan Interview (*wawancara*).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **4.1. Tingkat Aktifitas Lembaga**

Pada pembahasan ini, mencoba menggambarkan bagaimana kemampuan yang dimiliki lembaga dapat dilihat dari dua segi : Pertama karakteristik anggota, yaitu dapat diukur dari tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan anggota. Kedua; kinerja lembaga, yaitu dapat diukur dari tingkat kesesuaian program dengan kebutuhan anggota dan tingkat pelayanan pengurus kepada anggota sebagai berikut.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu variabel yang dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi seseorang dalam berbagai kegiatan usaha. Tingkat pendidikan seseorang memungkinkan untuk dapat menilai sesuatu, sehingga ada dorongan dari dalam dirinya melakukan apa yang dianggap benar. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang berarti semakin besar kemungkinan dalam mempertimbangkan segala sesuatu dalam hidupnya.

Tabel 1: Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Tidak/tamat SD	2	2,2
Tamat SLTP	9	10,0
Tamat SLTA	56	62,2
Sarjana	24	26,7
Jumlah	90	100,0

Sumber : Survei Lapangan, Juni 2019

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mempunyai tingkat pendidikan hanya tidak/tamat SD sebesar 2,2 persen. Selanjutnya yang tamat SLTP sebesar 10,0 persen. Kemudian yang tamat SLTA sebesar 62,2 persen. Sementara responden yang mempunyai tingkat pendidikan sarjana sebesar 26,7 persen dari seluruh responden.

Tingkat Pendapatan Responden. Tingkat pendapatan seseorang juga merupakan salah satu variabel yang sering dihubungkan dengan tindakan seseorang atau dengan kata lain pendapatan mempunyai pengaruh kemampuan dalam melakukan kegiatan usaha, terutama kemampuan berpartisipasi. Semakin tinggi pendapatan seseorang semakin besar peluang atau kemungkinan untuk turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang berpendapatan Rp. 1.000.000 - Rp.1.499.000. sebesar 31,1 persen, pendapatan terbesar kedua Rp. 1.500.000 - - Rp.1.999.000, yaitu sebesar 33,3 persen. Kemudian yang menempati peringkat ketiga adalah responden yang berpendapatan Rp. 1.000.000 ke bawah, yaitu sebesar 8,9 persen. Selanjutnya responden yang berpendapatan Rp. 2.000.000 - Rp.2.499.000 menempati posisi keempat yaitu sebesar 16,7 persen. Sementara yang paling sedikit adalah responden yang berpendapatan Rp. 2.500.000 ke atas , yaitu sebesar 10,0 persen dari tabel 90 responden. Data mengenai tingkat pendapatan terlihat pada tabel berikut

Tabel 2: Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan	Frekuensi	Persentase
< 1.000.000	8	8,9
1.000.000 -1.499.000	28	31,1
1.500.000 – 1.999.000	30	33,3
2.000.000 - 249.000	15	16,7
≥2.500.000	9	10,00
Jumlah	90	100,0

Sumber : Survei Lapangan, Juni 2019

Kesesuaian program dengan kebutuhan anggota merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan lembaga dalam hal memberi motivasi kepada anggota untuk turut berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan lembaga. Apabila jenis program yang ada dapat disesuaikan dengan apa yang diusahakan anggota tentunya mampu menstimulasi masyarakat untuk mengambil bagian di dalamnya. Sebaliknya jenis program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan sangat kurang diminati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata yang paling banyak adalah yang menjawab program yang ada sangat tidak sesuai dengan kebutuhan anggota, yaitu sebesar 37,8 persen. Kemudian yang menjawab tidak sesuai program dengan kebutuhan anggota sebesar 32,2 persen. Menyusul responden yang menjawab program sesuai dengan kebutuhan anggota sebesar 24,4 persen. Sementara yang paling sedikit adalah responden yang menjawab program sangat sesuai dengan kebutuhan anggota, yaitu hanya mencapai 5,6 persen dari seluruh responden.

Tabel 3: Distribusi Kesesuaian Program.

Kesesuaian Program	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak sesuai	34	37,8
Tidak sesuai	29	32,72
Sesuai	22	24,4
Sangat Sesuai	5	5,6
Jumlah	90	100

Sumber : Survei Lapangan, Juni 2019

Tingkat Pelayanan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau keberdayaan lembaga adalah faktor pelayanan kepada masyarakat (anggota). Pelayanan yang baik sangat mempengaruhi kinerja lembaga, terutama dalam hal kemampuan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Sebaliknya pelayanan yang tidak baik sangat

mempengaruhi minat atau motivasi masyarakat untuk lebih banyak terlibat di dalamnya. Adapun skala yang digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan digunakan kategori sangat memuaskan, memuaskan, tidak memuaskan, dan sangat memuaskan.

Tabel 4: Distribusi Tingkat Pelayanan

Tingkat Pelayanan	Frekuensi	Persentas
S. Tidak memuaskan	20	22,2
Tidak memuaskan	32	35,6
Memuaskan	27	30,0
S. Memuaskan	11	12,2
Jumlah	90	100,0

Sumber : Survei Lapangan, Juni 2019

Hasil penelitian menunjukkan bahwa d pelayanan tidak memuaskan, sebesar 22,2 persen. Kemudian yang menjawab pelayanan sangat tidak memuaskan ternyata juga sangat tinggi, sebesar 33,3 persen. Sementara yang mengatakan pelayanan memuaskan hanya sebesar 30.0 persen, dan sangat sedikit responden yang menjawab sangat memuaskan, sebesar 12,2 persen dari seluruh responden.

#### 4.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dapat diukur sejauh mana masyarakat terlihat dalam proses kegiatan usaha yang menyangkut operasionalisasi keputusan telah ditetapkan melalui rapat-rapat. Partisipasi masyarakat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang meliputi : pembayaran iuran/simpanan wajib, simpanan sukarela, penggunaan fasilitas, pembelian barang-barang kepada, koperasi. Adapun analisis tingkat partisipasi dalam tahap pelaksanaan tersebut, digunakan kategori sangat tinggi, rendah, dan sangat rendah yang disesuaikan dengan variabel yang diukur.

Pada tingkat partisipasi masyarakat mengenai pembayaran iuran/simpanan wajib dilihat berdasarkan frekuensi jumlah penyetoran selama satu tahun terakhir. Apabila pembayaran hanya dilakukan (1 - 3) kali, maka dikategorikan partisipasinya “sangat rendah”, jika pembayarannya dilakukan (4-6) kali dikategorikan partisipasinya “rendah “, selanjutnya jika pembayarannya dilakukan (7-9) kali dikategorikan partisipasinya “tinggi” jika pembayarannya mencapai (10-12) kali dalam setahun, maka partisipasinya dikategorikan “sangat tinggi”.

Hasil penelitian dari 90 responden diperoleh data bahwa kebanyakan responden yang hanya membayar antara (1 - 3) bulan yaitu sebesar 44,4 persen

dari seluruh responden. Selanjutnya terdapat 37,8 persen yang frekuensi pembayarannya antara (10-12 ) bulan dalam setahun, Kemudian responden yang membayar antara (4 – 6) bulan dalam setahun ternyata hanya mencapai 12,2 persen, ini berarti terjadi penurunan yang sangat menyolok sebagai akibat adanya perbedaan status responden antara pengurus dan anggota itu sendiri. Sementara responden yang paling sedikit membayar simpanan wajib antara (7 - 9) bulan dalam setahun, hanya terdapat 5, 6 persen.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Pembayaran iuran/Simpanan Wajib.

Frekuensi Pembayaran Iuran Dalam Setahun	Pengurus	Anggota	Semua Responden	
	%	%	%	n
1-3	-	66,7	44,4	40
4-6	6,7	15,0	17,2	11
7-9	16,7	-	5,6	5
10-12	76,6	38,3	37,8	34
Jumlah	100	100	100	-
n	(30)	(60)	-	(90)

Sumber : Survei Lapangan, Juni 2019

Dilihat dari tabel di atas memberikan gambaran bahwa terdapat perbedaan yang sangat menolak antara tingkat partisipasi pengurus dengan anggota dalam pembayaran simpanan wajib, dimana pengurus tergolong sangat tinggi, yaitu ada 23 orang atau sebesar 76,6 persen, sedangkan anggota tergolong sangat rendah, yaitu ada 40 orang atau sebesar 66,7 persen. Hal ini disebabkan pengurus sebagai anggota sudah pasti membayar karena kewajiban, walaupun tidak membayar akan dipotong gajinya oleh lembaga. Hanya saja ada sebagian tidak membayar karena pengurus yang bersangkutan tidak aktif dalam kepengurusan . sedangkan anggota itu sendiri kebanyakan tidak membayar karena mereka merasa uang simpanan tersebut akan hilang kalau lembaga tidak dapat berfungsi lagi.

Selanjutnya, jika pada tahap pelaksanaan dilihat partisipasi masyarakat dalam pembayaran simpanan sukarela, ternyata juga mengalami hal yang sama, dimana tingkat partisipasi yang tergolong sangat rendah. Pada penelitian ini frekuensi partisipasi diukur dengan banyaknya uang, setoran sebagai simpanan sukarela, meliputi ; antara tidak pernah dengan kategori “sangat rendah”, ( < 500.000 ) dengan kategori partisipasi rendah “( Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 ) dengan kategori partisipasi “tinggi”, dan (Rp. 1.000.000 < ) dengan kategori “sangat tinggi”. Adapun penetapan standar ukuran disesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat yang kebanyakan pekerjaannya sebagai petani.

Hasil penelitian, ternyata paling banyak yang tidak pernah menyetor simpanan sukarela, sebesar 67,8 persen. Selanjutnya yang menyetor simpanan sukarela (< 500.000), sebesar 21,1 persen. Kemudian responden yang berpartisipasi dalam pembayaran simpanan sukarela Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 sebesar 8,9 persen. Yang paling sedikit adalah responden yang berpartisipasi dalam membayar simpanan sukarela di atas Rp. 1.000.000 hanya sebesar 2,2 persen. Dengan demikian, tingkat partisipasi dalam pembayaran simpanan sukarela adalah tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan masyarakat terutama anggota disamping tidak ada sisa dari kebutuhan sehari-hari, juga merasa lebih penting untuk menambah modal usaha daripada disetor kepada lembaga. Data mengenai responden yang berpartisipasi dalam pembayaran simpanan sukarela, terlihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Banyaknya Pembayaran Simpanan Sukarela

Frekuensi Pembayaran dalam setahun terakhir	Pengurus	Anggota %	Semua Responden	
	%	%	%	n
Tidak ada	23,3	90,0	67,8	61
< 500.000	43,3	10,0	21,1	19
500.000 - 1.000.000	26,7	-	8,9	8
1.000.000 ke atas	6,7	-	2,2	2
Jumlah %	100	100	100	-
N	(30)	(60)	-	(90)

Sumber : Survei Lapangan, Juni 2019

Dilihat dari tabel di atas memberikan gambaran bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran simpanan sukarela terutama karena anggota hampir seluruhnya tidak pernah menyetor, walaupun ada hanya 10,0 persen atau sebanyak 6 orang dan itupun masih tergolong rendah. Responden yang menyetor khususnya anggota karena merupakan persyaratan untuk mendapatkan pinjaman yang lebih banyak bukan atas dasar mendapatkan keuntungan. Hanya saja dari pihak pengurus, ternyata lebih bervariasi karena seluruh komponen ukuran variasi Responden (pengurus) yang paling banyak adalah yang menyetor kurang dari Rp. 500.000, menyusul antara Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000.

Tingginya tingkat partisipasi dalam penggunaan pinjaman disebabkan banyak masyarakat baik pengurus, maupun anggota yang membutuhkan tambahan modal, dan bahkan dana yang tersedia tidak mencukupi permintaan. Lembaga yang banyak menyediakan fasilitas ini terutama koperasi simpan

pinjam atau KUD yang menyediakan Kredit Usaha Tani (KUT). Koperasi pasar dan koperasi sekolah kurang menyediakan fasilitas tersebut karena persediaan dana terbatas. Data mengenai responden yang berpartisipasi dalam penggunaan fasilitas pinjaman, terlihat pada tabel 11.

#### **4.3 Faktor-Faktor Pendorong dan penghambat Partisipasi Masyarakat**

Pertama, Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lembaga-lembaga ekonomi rakyat adalah asas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas keberadaan lembaga ekonomi rakyat. Selain itu, faktor kepemimpinan dari pengurus lembaga juga cukup menentukan partisipasi masyarakat. Disamping kedua hal tersebut di atas, nampaknya regulasi pemerintah berkenaan dengan usaha mendorong peningkatan ekonomi rakyat melalui koperasi-koperasi juga ikut mendorong terciptanya iklim yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi

Kedua, Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lembaga ekonomi rakyat adalah (1) alokasi anggaran untuk pengembangan koperasi relatif rendah; (2) pola pengembangan koperasi masih insidental; (3) inisiatif pengurus untuk mengembangkan jenis-jenis usaha masih terbatas. Selain hal tersebut di atas, faktor pendidikan dan pendapatan masyarakat yang sebagian diantara mereka juga relatif rendah cukup mempengaruhi partisipasi mereka.

#### **E. Penutup**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian sebagaimana dideskripsikan pada bagian di muka dalam tulisan ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut ; (1) Tingkat aktifitas lembaga ekonomi rakyat di Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan dapat dikatakan baik karena didukung oleh tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan pengurus relatif tinggi. Demikian pula dengan dengan tingkat pelayanan lembaga kepada anggota yang semakin baik, (2) Secara umum, tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan pelaksanaan, maupun pada tahap evaluasi ditemukan hampir seluruh berada pada tingkatan yang relatif sedang, dan bahkan cenderung agak baik. Hal ini disebabkan koperasi telah dipandang sebagai wadah bisnis dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (anggota), (3) Faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lembaga ekonomi rakyat : faktor pendorong adalah asas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas keberadaan lembaga ekonomi rakyat, kepemimpinan dari pengurus lembaga. Faktor penghambat meliputi : alokasi anggaran untuk pengembangan koperasi relatif rendah, pola pengembangan koperasi masih insidental.

Strategi yang sebaiknya dilakukan adalah : Pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pembinaan keterampilan berusaha dan mengelola usaha. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui modal

usaha yang diperlukan. Ketiga, meningkatkan pengawasan kepada lembaga sehingga program dan pelayanannya kepada masyarakat dapat dipertanggung jawabkan.

### **Daftar Pustaka**

- Adjid, D.A., (1995), *Pola Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan Berencana*, Orba Sakti, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, (1989), *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bryant, C dan L.G. White, (1997), *Manajemen Pembangunan (untuk NO 9M Berkembang)*, LP3ES, Jakarta.
- Chambers, Robert, (1996), *PRA Participation Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Conyers, D., (1991), *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Eaton, Joseph W., (1986), *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional, I* Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, (1996). *Pembangunan untuk Rakyat*, Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Mubryarto, (1997), *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Prijono, Omny S., (1996), *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi CIDES*, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, (1985), *Metode Penelitian dan Survei* LP3ES, Jakarta.
- Slamet, Y., (1994), *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Soerisno, Lockman (1995), *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sugiyono, (1993), *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.